

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi dunia usaha maupun bagi instansi publik. Laporan keuangan memiliki peran sebagai objek dari akuntabilitas dan transparansi sebagaimana telah menjadi tuntutan masyarakat di semua lembaga (Kaihatu, 2006). Selain itu, laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2007).

Pada dasarnya, laporan keuangan merupakan cermin dari kinerja dan informasi keuangan sebuah perusahaan secara umum yang berarti pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan oleh investor kepada mereka. Informasi yang berasal dari laporan keuangan perusahaan digunakan oleh investor dan pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya jika informasi tersebut memberikan sinyal positif maka penilaian investor terhadap perusahaan menjadi tinggi, begitu pula sebaliknya (Fahmi, 2012).

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka

informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan (Fikri. 2014). Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005).

Menurut Sutabri (2012) nilai informasi ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaat lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis *cost effectiveness* atau *cost benefit*. Dalam kaitannya dengan masalah laporan keuangan, nilai informasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia dan serta pemanfaatan dari teknologi informasi yang di miliki termasuk di dalamnya mencakup kualitas sistem informasi yang diterapkan. Alasannya adalah diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007).

Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan, sehingga

mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah (Andriani, 2010).

Lembaga Pemerintah sebagai salah satu entitas pelapora dalam hal keuangan juga dituntut untuk menyajikan pelaporan setiap periode karena menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan dan penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat serta terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumber-sumber tersebut (Nurul, Dkk. 2014).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Desa sebagai struktur pemerintahan yang paling kecil juga sangat dituntut untuk membuat laporan keuangan. Hal tersebut karena bersamaan dengan Undang-undang terkait Pemerintah telah merealisasikan dana desa yaitu sebesar 1 Millyar untuk Pemerintah Desa per tahun. Pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa (Kemendesa, 2015). Hal ini merupakan salah satu langkah yang dinamis di dalam pengelolaan keuangan pemerintahan karena selama ini regulasi mengenai pengelolaan keuangan pemerintahan secara terperinci hanya sampai pada tingkatan pemerintah daerah.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Yuliani. 2010).

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan. Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan teknologi informasi di dalam penyusunan laporan keuangan salah satunya yaitu sistem informasi akuntansi (Roviyantie, 2011).

Ketaatan terhadap Undang-undang ini harus dilaksanakan oleh semua penyelenggara pemerintahan termasuk Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan wilayah administratifnya, Kecamatan Jenangan merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan di bawah pemerintah Kabupaten yang mana semua kelurahan dan Desa yang ada dibawahnya juga telah melakukan pencatatan pelaporan keuangan kepada Instansi di atasnya serta telah menggunakan teknologi informasi dalam operasional keseharian.

Selain mengelola Dana Desa, sesuai UU Nomor 6 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota (BPKP, 2016). Persoalannya sebagai salah satu guliran kebijakan yang baru tentu terdapat banyak kendala salah satunya dalam rangka memahami aturan main kebijakan secara utuh maupun dalam operasional program.

Pada tahun 2015 Deputi Pencegahan KPK melaporkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa memiliki banyak potensi masalah terkait dengan tata laksana. Lebih khusus KPK mencatat bahwa pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa kurang transparan, laporan pertanggungjawaban Desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi dan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh Desa tidak efisien (KPK, 2015).

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur desa dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Andriani, Dkk. 2014).

Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang didasari oleh alasan bahwa selama ini Pemerintah Desa menjalankan pekerjaannya secara manual dan berubah menjadi terkomputerisasi serta terhubung dengan teknologi informasi sebagaimana paket undang-undang telah menjadi fenomena tersendiri yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Fenomena ini juga menjadi bahan pertimbangan dan revisi dari kementerian keuangan, kementerian desa dan kementerian dalam negeri serta masuk ke dalam pelaporan Komisi Pemberantasan Korupsi (Deviani, Dkk. 2013).

Sumber daya manusia yang handal, mengerti, memahami dan familiar dengan masalah teknologi informasi tentu akan mudah dalam mengoperasikan teknologi informasi yang dicapai untuk menghasilkan informasi yang valid. Sebaliknya, minimnya pengetahuan akan teknologi informasi pada akhirnya akan mengurangi nilai kevalidan dan kehandalan data yang dikeluarkan melalui teknologi informasi itu sendiri (Atmadja, Dkk 2015).

Rendahnya kualitas laporan juga dapat disebabkan oleh belum diterapkannya sistem informasi akuntansi keuangan yang berbasis teknologi informasi atau kurangnya pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri atau kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat. Oleh karena itu dalam laporan tersebut KPK merekomendasikan kepada kementerian terkait untuk melakukan *couching* terhadap SDM yang terlibat serta menyiapkan perangkat pelaporan sesuai juklak dan juknisnya (Atmadja, Dkk. 2015).

Kenyataan ini tentu akan menghambat tujuan dan cita-cita pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Kekhawatiran mengenai hal ini juga dirasakan oleh pemerintah dan mengantisipasinya dengan cara melakukan rekrutmen terhadap tenaga pendamping yang akan melakukan pendampingan pengelolaan keuangan Desa dengan perangkat Teknologi Informasi yang dimiliki.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pada Kantor Pemerintahan Kelurahan/Desa (Survey Pada Kantor Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Kantor Kelurahan/Desa di Wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Kantor Kelurahan/Desa di Wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersamaan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Kantor Kelurahan/Desa di Wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Kantor Kelurahan/Desa di Wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Kantor Kelurahan/Desa di Wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersamaan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Kantor Kelurahan/Desa di Wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian di bidang akuntansi.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi seluruh kantor Desa dan Kelurahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan bacaan dan literatur untuk menambah pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

